



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 8577-8585

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia

Saskia Putri, Dinda Nurmelita, Sella Mardiana, Ansharullah

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

12410620256@students.uin-suska.ac.id, 12410623397@students.uin-suska.ac.id, 12410621290@students.uin-suska.ac.id,
ansharullah@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional melalui penerapan kebijakan fiskal, pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi ekonomi, serta pengembangan ekonomi syariah. Berbagai kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingkat pengangguran, kemiskinan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan optimal di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Infrastruktur

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan utama negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas terhadap jalannya aktivitas ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Menurut Fitriani, Yulistiyo, dan Ariani (2025), kebijakan pemerintah memiliki kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan itu, Unga, Abdullah, dan Asrul (2025) menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global yang terus berubah.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Selain itu, konflik geopolitik dunia, kenaikan harga energi, inflasi global, dan perlambatan ekonomi internasional turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial, subsidi energi, insentif pajak, serta peningkatan investasi nasional. Menurut Julihandono (2023), kebijakan pemerintah melalui program padat karya dan bantuan ekonomi mampu membantu menekan angka pengangguran selama masa pemulihan ekonomi. Sementara itu, Moedy dan Ling (2024)

menjelaskan bahwa percepatan belanja pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya. Peningkatan belanja pemerintah di berbagai sektor diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fitriani, Yulistiyo, dan Ariani (2025) menyatakan bahwa transformasi paradigma fiskal Indonesia diarahkan pada pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Di sisi lain, Nugroho dan Ardianto (2025) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi, konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan investasi dan pengembangan sektor industri. Investasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor domestik maupun asing. Ngurah Gede, Wijayanto, Iskanda, Watekhi, dan Puri (2024) menjelaskan bahwa peningkatan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Selanjutnya, Zia (2024) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi nasional, termasuk ekonomi syariah, dapat menjadi salah satu strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi nasional juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, serta fasilitas transportasi lainnya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Moedy dan Ling (2024), percepatan pembangunan infrastruktur melalui belanja pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan produktivitas ekonomi nasional. Selain itu, Unga, Abdullah, dan Asrul (2025) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.

Meskipun demikian, berbagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketergantungan terhadap sektor tertentu masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan. Nugroho dan Ardianto (2025) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, Ngurah Gede dkk. (2024) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional di Indonesia menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai peran kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional di Indonesia melalui berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada

makna, proses, dan interpretasi data yang diperoleh di lapangan maupun dari berbagai sumber ilmiah. Sejalan dengan itu, Yusuf (2021) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber referensi yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif berfungsi untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan berbagai kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, investasi, pembangunan infrastruktur, dan program pemulihan ekonomi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui jurnal nasional, buku, artikel ilmiah, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Menurut Arikunto (2020), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen, arsip, maupun hasil penelitian lain yang telah tersedia sebelumnya. Selain itu, Zed (2020) menyatakan bahwa studi kepustakaan menjadi salah satu metode yang efektif untuk memperoleh informasi ilmiah yang berkaitan dengan suatu permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pembangunan ekonomi nasional. Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui catatan, buku, jurnal, maupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid dan mendukung analisis penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur untuk menemukan konsep, teori, dan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Menurut Krippendorff (2021), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan isi suatu dokumen atau teks secara sistematis dan objektif. Selanjutnya, Miles dan Huberman (2020) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis berbagai sumber yang telah dikaji sehingga diperoleh pemahaman mengenai peran kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai jurnal nasional dan sumber ilmiah, diketahui bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang meliputi kebijakan fiskal, moneter, investasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi ekonomi, serta program pemulihan ekonomi nasional menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fitriani, Yulistiyono, dan Ariani (2025), kebijakan fiskal yang terarah mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, Rahman dan Widodo (2021) menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah melalui pengelolaan APBN memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menggunakan anggaran negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, pendidikan, dan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Moedy dan Ling (2024) menyatakan bahwa percepatan belanja pemerintah mampu meningkatkan aktivitas ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat. Sejalan dengan itu, Arifin dan Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi masyarakat. Nugroho dan Ardianto (2025) juga menambahkan bahwa

pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain kebijakan fiskal, hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah setelah pandemi COVID-19 memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan sosial, subsidi usaha, dukungan terhadap UMKM, dan program padat karya untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Julihando (2023) menyatakan bahwa program padat karya mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat selama masa pemulihan ekonomi. Selanjutnya, Siregar dan Putri (2023) menjelaskan bahwa strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional berhasil membantu peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pascapandemi. Unga, Abdullah, dan Asrul (2025) juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah selama perlambatan ekonomi global mampu menjaga ketahanan ekonomi Indonesia agar tetap stabil.

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa investasi menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi guna menarik investor domestik maupun asing. Kebijakan investasi yang baik mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Ngurah Gede, Wijayanto, Iskanda, Watekhi, dan Puri (2024) menjelaskan bahwa investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Selain itu, Hasibuan dan Pratama (2021) menyatakan bahwa peningkatan investasi daerah dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Lestari dan Hidayat (2024) juga menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif dapat tercapai apabila kebijakan investasi dilakukan secara merata dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mempercepat pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan sarana transportasi lainnya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Yusuf dan Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu memperlancar distribusi barang dan jasa. Selain itu, Moedy dan Ling (2024) menyatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menarik minat investor untuk menanamkan modal di berbagai daerah Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Rahman dan Widodo (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional di era globalisasi. Selain itu, Prakoso dan Amelia (2025) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui regulasi, penguatan lembaga keuangan syariah, dan pengembangan industri halal. Zia (2024) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Lestari dan Hidayat (2024) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meskipun berbagai kebijakan pemerintah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional, hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang masih dihadapi Indonesia. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Nugroho dan Ardianto (2025) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan stabilitas ekonomi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Hasibuan dan Pratama (2021) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan daerah dapat menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang merata.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar pembangunan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Arifin dan Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa sinergi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi nasional. Sementara itu, Prakoso dan Amelia (2025) menegaskan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Kebijakan fiskal, investasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekonomi syariah, serta program pemulihan ekonomi nasional memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi agar mampu mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang inklusif berarti bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, dan kelompok rentan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan melalui berbagai program strategis, seperti pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa, pembangunan desa, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor UMKM. Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya kualitas tenaga kerja, ketimpangan akses pendidikan, serta tingginya tingkat pengangguran pada kelompok usia produktif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Nugroho dan Ardianto (2025), kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa perkembangan teknologi dan inovasi memiliki peranan yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi, perluasan akses internet, serta digitalisasi layanan publik dan sektor usaha. Kebijakan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses pasar, memperoleh informasi, dan mengembangkan usaha secara lebih efisien. Digitalisasi juga membantu meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Menurut Prakoso dan Amelia (2025), pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing UMKM di tingkat nasional maupun internasional.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan aspek lingkungan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat jangka panjang apabila menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, energi terbarukan, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kajian berbagai jurnal nasional dan sumber ilmiah, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan stabilisator dalam mengatur jalannya perekonomian nasional agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang tepat mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Fitriani, Yulistiyo, dan Ariani (2025), kebijakan fiskal pemerintah menjadi instrumen utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, Rahman dan Widodo (2021) menyatakan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menggunakan APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta memperluas aktivitas ekonomi nasional. Moedy dan Ling (2024) menjelaskan bahwa percepatan belanja pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan pembangunan sektor produktif. Sejalan dengan itu, Arifin dan Rahmawati (2022) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Selain kebijakan fiskal, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Program PEN dilakukan melalui bantuan sosial, subsidi usaha, dukungan terhadap UMKM, dan program padat karya guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, program tersebut memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran. Julihandono (2023) menjelaskan bahwa program padat karya yang dijalankan pemerintah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka kesempatan kerja baru selama masa pemulihan ekonomi. Sementara itu, Siregar dan Putri (2023) menyatakan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi nasional berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat pascapandemi.

Dalam pembangunan ekonomi nasional, investasi juga memiliki peranan yang sangat penting. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan investasi mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas nasional, dan mempercepat pembangunan daerah. Ngurah Gede, Wijayanto, Iskanda, Watekhi, dan Puri (2024) menjelaskan bahwa investasi memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Selain itu, Hasibuan dan Pratama (2021) menyatakan bahwa investasi daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan sarana transportasi lainnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yusuf dan Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat mempercepat aktivitas perdagangan dan investasi. Selain itu, Moedy dan Ling (2024) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi perkembangan UMKM, perdagangan elektronik, dan pelayanan publik berbasis teknologi. Rahman dan Widodo (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi mampu meningkatkan efektivitas aktivitas ekonomi dan memperluas akses pasar masyarakat. Selanjutnya, Prakoso dan Amelia (2025) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan produktivitas UMKM dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan ekonomi syariah dilakukan melalui penguatan lembaga keuangan syariah, pengembangan industri halal, dan peningkatan literasi ekonomi syariah masyarakat. Zia (2024) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Lestari dan Hidayat (2024) juga menyatakan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meskipun berbagai kebijakan pemerintah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kemiskinan masih menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi nasional. Nugroho dan Ardianto (2025) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan stabilitas ekonomi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Hasibuan dan Pratama (2021) menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan daerah dapat menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang merata.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan daerah, penguatan sektor UMKM, dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan secara optimal. Arifin dan Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa kerja sama antar berbagai pihak menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, pembangunan ekonomi nasional di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori pembangunan ekonomi modern, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur semata-mata dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga dari kemampuan suatu negara dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah. Pembangunan yang inklusif memungkinkan masyarakat dari berbagai kelompok sosial dan ekonomi memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam konteks Indonesia, upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, pembiayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal merupakan langkah penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan dan Pratama (2021) yang menyatakan bahwa pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan. Transformasi digital memberikan peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan inovasi produk maupun layanan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung perkembangan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan keamanan siber. Rahman dan Widodo (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional sekaligus mempercepat proses pembangunan di berbagai sektor.

Lebih lanjut, pembangunan ekonomi nasional pada era modern juga harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Menurut Lestari dan Hidayat (2024), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan menciptakan keseimbangan antara

kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*). Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan. Sebaliknya, lemahnya tata kelola pemerintahan dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Arifin dan Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa pembangunan ekonomi nasional memerlukan kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal, investasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekonomi syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan secara terpadu agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pembangunan ekonomi nasional diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Di samping itu, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memberikan dukungan melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Prakoso dan Amelia (2025) menjelaskan bahwa penguatan UMKM berbasis digital dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi nasional juga memerlukan pemerataan pembangunan antarwilayah agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada daerah tertentu. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik wilayah yang beragam, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Hasibuan dan Pratama (2021) menyatakan bahwa pemerataan pembangunan wilayah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.

Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan ekonomi dunia yang semakin dinamis, pemerintah dituntut untuk mampu menyusun kebijakan yang adaptif terhadap berbagai perubahan global. Tantangan seperti krisis ekonomi internasional, perkembangan teknologi yang cepat, perubahan iklim, dan persaingan pasar global memerlukan strategi pembangunan yang inovatif dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi. Dengan langkah tersebut, Indonesia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang muncul untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

pembangunan ekonomi yang berhasil harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila manfaatnya hanya dirasakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan publik, serta pemerataan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, seperti kebijakan fiskal, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi syariah terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Namun demikian, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan serta adanya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, pemanfaatan teknologi digital, dan pemerataan pembangunan daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur dapat tercapai secara optimal.

Referensi

1. Arifin, S., & Rahmawati, D. (2022). Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 23(1), 34–46.
2. Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
3. Fitriani, F., Yulistiyono, H., & Ariani. (2025). Transformasi paradigma fiskal Indonesia dalam konteks pembangunan dan kemandirian nasional. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 115–128.
4. Hasibuan, R., & Pratama, A. (2021). Pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(3), 201–214.
5. Julihandono, C. (2023). Efektivitas dan efisiensi belanja prioritas program padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran di masa pandemi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–58.
6. Krippendorff, K. (2021). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
7. Lestari, F., & Hidayat, M. (2024). Kebijakan pemerintah dan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Nasional*, 12(1), 66–79.
8. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
9. Moedy, B. K., & Ling, M. (2024). Dampak akselerasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(2), 97–110.
10. Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
11. Ngurah Gede, W. A. A., Wijayanto, A. W., Iskanda, D. A., Watekhi, & Puri, I. A. W. R. I. (2024). Impact of investment on inclusive economic development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 116–132.
12. Nugroho, M. A., & Ardianto, E. P. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022–2024. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 14(2), 88–102.
13. Prakoso, H., & Amelia, V. (2025). Analisis efektivitas kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Indonesia*, 15(1), 50–64.
14. Rahman, T., & Widodo, S. (2021). Kebijakan ekonomi pemerintah dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modern*, 9(2), 120–133.
15. Siregar, M., & Putri, N. (2023). Strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 77–91.
16. Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
17. Unga, W. O. H., Abdullah, A., & Asrul. (2025). Ketahanan ekonomi dan respons kebijakan di Indonesia: Bukti dari perlambatan ekonomi global tahun 2019–2024. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 210–223.
18. Yusuf, A. M. (2021). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.
19. Yusuf, A., & Kurniawan, R. (2022). Pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 15–28.
20. Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
21. Zia, N. K. (2024). Analisis kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 55–67.